



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA CIMAHI

Priskila¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Cimahi. Masalah dalam penelitian ini adalah Masih terjadi kekerasan seksual pada anak di Kota Cimahi karena kurangnya peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual tersebut, maka setiap tahunnya terjadi naik turun dalam angka korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Cimahi belum cukup baik. Dilihat dari 1. Fasilitator, Pemerintah Daerah berperan dalam menjembatani berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak. Ini tercermin dari langkah-langkah seperti koordinasi lintas sektor, penyediaan layanan pendampingan, edukasi publik, serta advokasi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi yang belum merata 2. Regulator, Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan anak melalui penyesuaian regulasi nasional ke dalam kebijakan lokal. Dalam hal ini, kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi masih dalam prses 3. Katalisator, Pemerintah Daerah memegang peran penting dalam mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Kekerasan Seksual; Anak

Abstract

This research is titled The Role of Local Government in Addressing Sexual Violence against Children in Cimahi City. The problem in this research is that sexual violence against children still occurs in Cimahi City due to the lack of government involvement in addressing such sexual violence, resulting in fluctuations in the number of victims of sexual violence each year. The research method used in this study is descriptive, with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Cimahi City Government in Addressing Sexual Violence against Children in Cimahi City is not sufficiently good. This is seen from 1. Facilitators, where local government plays a role in bridging various parties involved in child

protection. This is reflected in steps such as cross-sector coordination, provision of accompanying services, public education, and advocacy carried out by institutions that have not been evenly distributed. 2. The regulator, the local government, carries out the function of regulation and supervision of child protection policies by adapting national regulations into local policies. In this case, the policies and rules issued by the Cimahi City Government are still in the process. 3. The catalyst, the local government plays an important role in encouraging a change in mindset and behavior of the community towards issues of sexual violence. **Keywords:** : Local Government; Sexual Violence; Children

PENDAHULUAN

Anak memiliki peran strategis dalam keberlangsungan hidup masyarakat dan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga negara, masyarakat, dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup anak (Ummah, 2019).

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa anak justru menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan *trend* yang mengkhawatirkan, baik dari sisi jumlah kasus maupun dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Penyebab dari kekerasan seksual ini antara lain adalah lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya pendidikan seksual sejak dini, kondisi ekonomi keluarga, hingga maraknya penggunaan media sosial yang tidak terkontrol (Julita dan Meilani, 2023). Kekerasan seksual berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis anak, mulai dari depresi, rasa takut, menarik diri dari lingkungan, hingga kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri (Sari, 2018).

Data Komnas Perempuan (2024) mencatat adanya 2.228 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan sepanjang tahun 2022. Sementara itu, KPAI juga menerima ribuan pengaduan terkait perlindungan anak, dengan kekerasan seksual sebagai kasus yang

paling dominan. Di sisi lain, lemahnya pemahaman aparat penegak hukum serta belum optimalnya sistem perlindungan membuat penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum berjalan secara maksimal (Nurrahman, 2020).

Kondisi ini juga tercermin di Kota Cimahi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 tercatat 17 kasus, naik menjadi 27 kasus pada 2021, dan melonjak tajam menjadi 78 kasus pada tahun 2022. Meskipun tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit penurunan, jumlah kasus yang tercatat masih menunjukkan adanya urgensi penanganan yang lebih intensif. Peningkatan pelaporan ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, berkat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Open Data Kota Cimahi, 2024).

Persoalan kekerasan seksual terhadap anak menuntut keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pencegahan dan penanganan di tingkat lokal. Pemerintah daerah harus menjalankan perannya sebagai fasilitator yang menyediakan layanan pendukung dan edukasi, sebagai regulator yang menyusun kebijakan lokal yang berpihak pada perlindungan anak, serta sebagai katalisator yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Namun, implementasi peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, hingga kendala sosial-budaya seperti anggapan tabu dalam membahas isu kekerasan seksual. Rendahnya kapasitas sebagian aparat dalam menangani kasus anak juga menjadi hambatan tersendiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kota Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual pada anak, guna mewujudkan perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara lebih menyeluruh dalam konteks yang alami, dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti. Sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2020), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan gejala sosial secara menyeluruh dan kontekstual, dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data.

Penelitian ini berfokus pada unit analisis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan lain seperti orang tua korban, masyarakat, dan pihak sekolah tingkat menengah pertama sebagai bagian dari subjek yang relevan dalam menggambarkan implementasi kebijakan dan program perlindungan anak di lapangan.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode

purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan lebih fokus dan relevan terhadap tujuan penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari para informan yang dianggap kompeten dan relevan. Observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi nyata di lapangan, baik dalam aktivitas lembaga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip, laporan kegiatan, dokumen resmi, maupun literatur dari media cetak dan daring yang dapat memperkuat hasil penelitian (Sari, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan melalui wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen pendukung, seperti kebijakan, laporan kegiatan, publikasi resmi, serta referensi pustaka lainnya yang mendukung analisis data.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara berkesinambungan guna memperoleh gambaran yang utuh, bermakna, dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Karena bersifat kualitatif, penelitian ini tidak menggunakan model statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi terhadap makna di balik data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori menurut Gede Diva dalam akbarudin yang menyatakan peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Dalam dimensi katalisator, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memainkan peran strategis dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dan membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak. Peran ini diwujudkan melalui berbagai bentuk intervensi non-struktural seperti edukasi, kampanye, dan kolaborasi multisektor.

Penanggulangan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan secara sistematis oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Berdasarkan teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Gede Diva dalam (Akbaruddin, 2018), terdapat tiga peran utama pemerintah daerah dalam konteks perlindungan anak, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Ketiga peran tersebut terlihat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan di Kota Cimahi. Berikut ini merupakan hasil temuan penelitian berdasarkan masing-masing peran tersebut:

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupaya menyediakan dukungan, sarana, dan prasarana dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, DP3AP2KB Kota Cimahi memiliki peran sentral dalam memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan stakeholder melalui kegiatan rapat koordinasi, forum anak, dan pelatihan-pelatihan.

DP3AP2KB juga memberikan ruang kepada masyarakat dan lembaga pendidikan untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Dinas Pendidikan Kota Cimahi turut berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta mendorong pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Selain itu, mereka juga mendukung penyediaan modul pembelajaran terkait perlindungan anak.

Dinas Sosial memfasilitasi layanan pendampingan psikososial bagi anak korban kekerasan melalui kerja sama dengan psikolog dan pekerja sosial. Dinas ini juga memberikan bantuan pemulihan sosial dan penguatan keluarga bagi anak yang terdampak.

2. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Dalam dimensi regulator, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan kebijakan dan regulasi daerah yang mengacu pada peraturan nasional mengenai perlindungan anak. DP3AP2KB menjadi motor penggerak dalam menyusun dan mengawal regulasi daerah, termasuk dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang sedang dalam proses legalisasi melalui Peraturan Wali Kota. Selain itu, peran regulator juga terlihat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, lembaga masyarakat, dan OPD lainnya. Dinas Pendidikan, misalnya, menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Dinas Sosial juga menjalankan fungsi regulatif dalam integrasi kebijakan nasional ke dalam kebijakan lokal, terutama dalam pelaksanaan mekanisme Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), yang menjadi bagian dari sistem perlindungan anak berbasis

masyarakat.

3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, Pemerintah Kota Cimahi berupaya membangun kesadaran dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. DP3AP2KB melaksanakan berbagai bentuk advokasi dan kampanye, seperti penyuluhan di lingkungan keluarga, forum anak, dan organisasi perempuan. Program seperti "Forum Anak Daerah", "Sahabat Anak", dan "Sekolah Ramah Anak" menjadi wadah penting dalam mendorong perubahan nilai dan norma sosial yang berpihak pada perlindungan anak.

Dinas Sosial turut memperkuat peran masyarakat melalui edukasi berbasis komunitas. Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan kader sosial untuk menyebarkan informasi dan mengubah budaya di masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Sementara itu, Dinas Pendidikan memanfaatkan peran strategis sekolah dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Kolaborasi lintas sektor dengan DP3AP2KB dan Dinas Sosial juga terus didorong untuk memperkuat upaya pencegahan secara sistemik melalui pendidikan karakter, pelatihan guru, dan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis tarik mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Cimahi, bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menjalankan perannya dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak melalui tiga dimensi utama.

Pertama, sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi layanan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta pembentukan PATBM dan Sekolah Ramah Anak. Kedua, sebagai regulator, pemerintah

mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal, mendorong pembentukan UPT PPA, serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di instansi terkait. Ketiga, sebagai katalisator, pemerintah mendorong kolaborasi dengan masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Meskipun peran tersebut telah berjalan, masih diperlukan peningkatan sumber daya, sinergi antarinstansi, dan kesadaran masyarakat agar perlindungan anak di Kota Cimahi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbaruddin, S. (2018). Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Program Permakanan Oleh Dinas Sosial Di Kota Surabaya. *Doctoral Dissertation Universitas Airlangga*, 1–7.
- Open Data Kota Cimahi. (2024). *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Cimahi*. Open Data Kota Cimahi. <https://opendata.cimahikota.go.id/pencarian?topic=pemberdayaan-perempuan-dan-pelindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-kb>
- Sari. (2018). *DI KABUPATEN KARAWANG*. 4(02), 56–65.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Ummah, M. S. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang. *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 114.